

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmadi, M. H. (2017). Determinan Keberhasilan E-Filing Pajak di Indonesia: Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua. *Jurnal Pajak Indonesia*.
- Anggraini, D., Azizah, D. F., & Jositrianto, T. (2014). Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap. *Jurnal Tesis*, 5.
- Badan Kepegawaian Negara. (2021). *Buku Statistik Pegawai Negeri Sipil Juni 2021*. Jakarta: Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara.
- Direktur Jenderal Pajak. (2013, September 13). Standard Operating Procedure Tata Cara Pembayaran Gaji di KPP Nomor KPP10-0069. Kementerian Keuangan.
- Direktur Jenderal Pajak. (2015, Agustus 7). Peraturan Direktur Jenderal Pajak NOMOR: PER-32/PJ/2015 Tentang PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI. Jakarta, Indonesia.
- Herdiyan. (2014, November 25). *PENGGELAPAN PAJAK: Bendaharawan di Gorontalo Divonis 1 Tahun Penjara*. Diambil kembali dari Bisnis.com: <https://kabar24.bisnis.com/read/20141125/78/275335/penggelapan-pajak-bendaharawan-di-gorontalo-divonis-1-tahun-penjara>

- Mandak, A., & Morasa, J. (2015). Prosedur Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Ilmiah*, 10(1), 32.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mulyadi. (2001). Sistem Akuntansi Edisi Tiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Pemerintah Indonesia. (1999, Maret 29). KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 26 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN DAN PENYALURAN DAN GAJI BAGI PEGAWAI DAERAH. Jakarta, Indonesia.
- Pemerintah Indonesia. (1999). Undang-Undang Pokok Kepegawaian No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan UU No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Indonesia.
- Pemerintah Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Pemerintah Indonesia. (2014, Januari 15). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. DKI Jakarta, Indonesia.
- Pemerintah Indonesia. (2021, Oktober 7). Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Indonesia.
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Ratnafuri, K., & Herawati, N. (2012). Malpraktek Pemotongan dan Pemungutan Pajak Oleh Bendaharawan Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 3(3), 472.
- Sutanto, A. (2008). Sistem informasi Akuntansi. Bandung: Lingga Jaya.
- Waluyo. (2002). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.
- Waluyo. (2009). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.